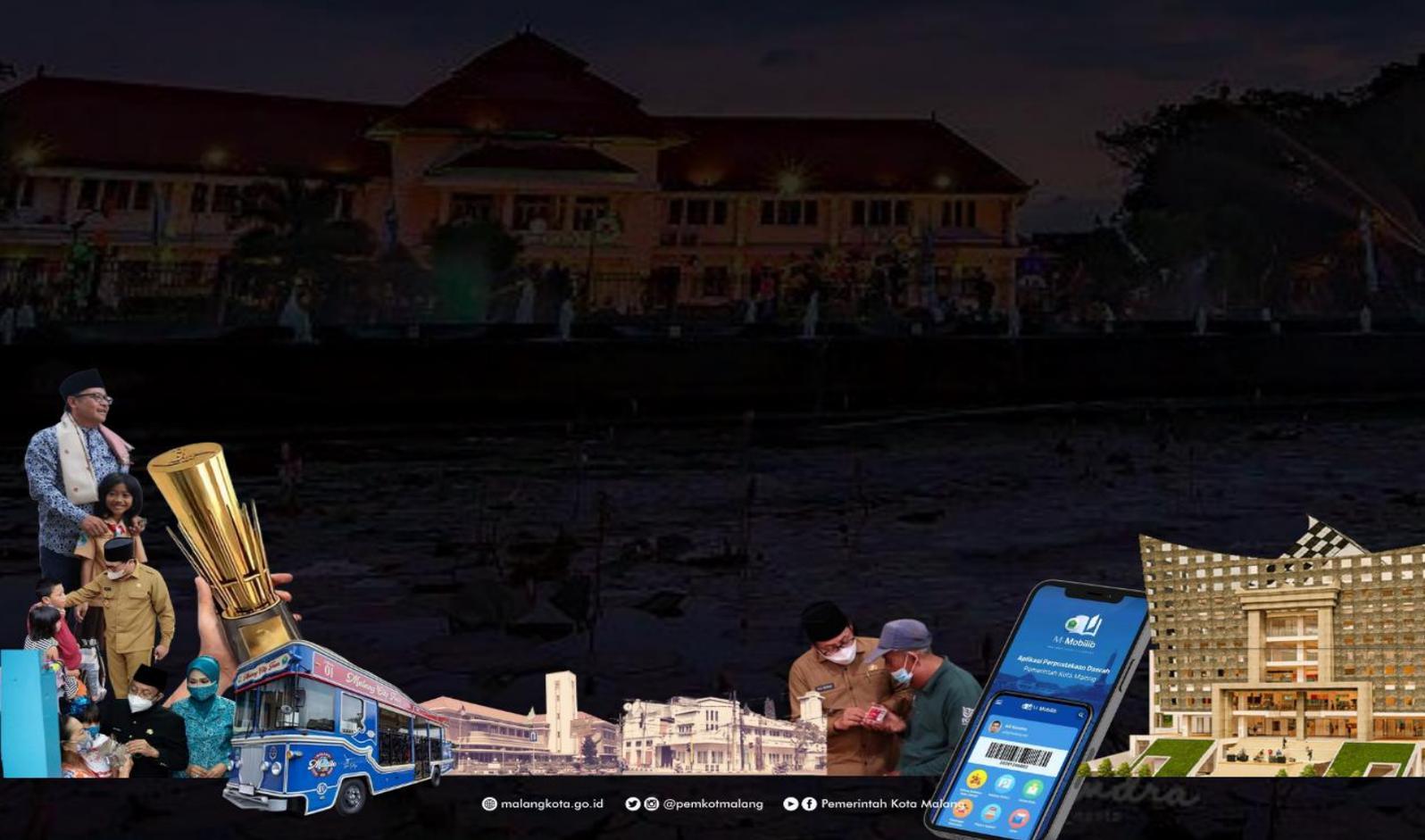


LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kota Malang

Tahun 2022





PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Gajahmada Nomor 2A Malang telp.(0341) 364450 – 321276

Kode Pos 65119

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Malang, 10 Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH KOTA MALANG,



Drs. MULYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19850627 198602 1 004



Ringkasan Eksekutif

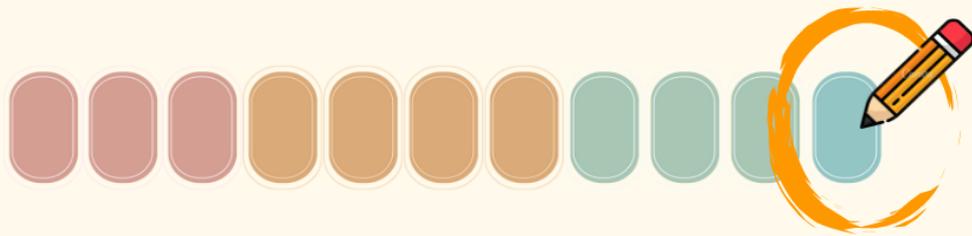
Tata pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien merupakan refleksi dari usaha reformasi birokrasi yang dikelola dengan baik. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Malang selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita – cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2022 masuk dalam kategori “**BERHASIL**”, karena rata-rata capaiannya **101,52%** dari target. Keberhasilan tersebut merupakan buah upaya Kota Malang untuk bangkit dari bencana non-alam berupa pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Adaptasi terhadap kondisi *new normal* membuat Pemerintah Kota Malang lebih berinovasi dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Walaupun demikian, masih terdapat indikator yang tidak berhasil mencapai di antaranya adalah Indeks Kematangan SPBE. Selain itu, indikator yang masih kurang maksimal pencapaiannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dan Persentase Penurunan PMKS. Sedangkan indikator lain, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks pembangunan Gender (IPG), dan Nilai Sakip walaupun capaiannya masih kurang maksimal, namun capaiannya sudah di atas 90%. Belum maksimalnya penurunan PMKS dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang juga tidak lepas dari dampak COVID-19 yang berkelanjutan mulai tahun 2020, dan masih dalam tahap pemulihan. Akan tetapi perlu analisa mendalam terkait angka pengangguran karena terjadi perubahan pola perdagangan yang dulu terbiasa *offline* dan memiliki kantor sekarang menjadi lebih banyak *online* meskipun hanya bekerja di rumah. Perhitungan para pekerja di rumah ini apakah menjadi kategori pengangguran atau tidak masih perlu analisa mendalam. Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, Pemerintah Kota Malang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan ekonomi maupun target kinerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD Tahun 2018-2023.

Capaian Kinerja Kota Malang

TAHUN 2022

BERHASIL



Rata-rata capaian kinerja **101,52%**



Rata-rata capaian kinerja saat terdampak pandemik Covid-19 pada tahun 2020 menurun. Akan tetapi berangsur-angsur meningkat sampai tahun 2022 sebesar **101,52%**.

Hal ini menunjukkan Kota Malang **berhasil memacu kinerjanya** dan pemulihan dari dampak Covid-19

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Walikota untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *clean government* yaitu pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah, maka Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sehingga Informasi Laporan Kinerja juga disampaikan dalam LPPD.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

1. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Malang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Malang Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2013, sebagai berikut:



Kota Malang Bermartabat

Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “Martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “ Kota Malang BERMARTABAT” diharapkan dapat terwujud suatu kondisi tatanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT)

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya bagi Semua Warga;
2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan;
3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender; dan
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

KOTA MALANG BERMARTABAT TAHUN 2018 - 2023



Perda Nomor 1 Tahun 2019
RPJMD Kota Malang 2018-2023

Perda Nomor 5 Tahun 2021
Perubahan atas Perda 1/2019 tentang RPJMD
Kota Malang 2018-2023

3 Pendekatan
Penyusunan
RPJMD

Berorientasi Hasil
Money follow program,
program follow result
Crosscutting & Refokussing

Misi 01



Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga

Misi 02



Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing, berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan

Misi 03



Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan thd masy. rentan dan gender

Misi 04



Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel

Tujuan 01

Layanan Dasar

Sasaran 1 Pendidikan

Sasaran 2 Kesehatan

Sasaran 3 Daya Beli

Tujuan 02

Daya Saing Ekonomi

Sasaran 4 Ekraf

Sasaran 5 Infrastruktur

Sasaran 6 Tataruang dan LH

Tujuan 03

Pembangunan Inklusif

Sasaran 7 Perlind. Sosial

Sasaran 8 Pemberdayaan

Tujuan 04

Good Governance

Sasaran 9 Penegakan Perda

Sasaran 10 Kelembagaan

Sasaran 11 Meritokrasi

Sasaran 12 Pemanfaatan TIK

3. Tujuan dan Sasaran

Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,10
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,10
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power parity</i>	85,10
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,35
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,60
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50%
		Persentase penurunan PMKS	5,00%
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	0,884
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,10
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan	82%

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	83,5
		Opini BPK	WTP
		Maturitas SPIP	3,150
		Rasio PAD	0,30
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	75,84
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	

Tabel 2
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Malang

Misi 1		Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga							
Tujuan 1		Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77	78,00	79,00	77,00	77,10	77,20	77,20
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,4	81,40	81,60	81,80	82,10	82,30	82,30
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	84,6	84,70	84,80	85,00	85,10	85,20	85,20
Misi 2		Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan							
Tujuan 2		Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	n/a	6	6,1	6,2	6,3	6,45	6,45

2.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,50
3.	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (LKLHD)	82,15	82,92	83,69	67,57	67,60	67,63	67,63
Misi 3		Mewujudkan Kota yang rukun dan toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender							
Tujuan 3		Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka				8,20	7,5	6,24	6,24
		Persentase penurunan PMKS	2,23	5	5	5	5	5	5
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	0,868	0,884	0,900	0,900
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,71	96,8	96,9	97,0	97,10	97,20	97,20
Misi 4		Memastikan Keluasan Masyarakat atas layanan Pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel							
Tujuan 4		Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah & tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21	25	40	60	82	100	100
2.	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	70,96	75,65	80,5	82,05	83,50	84,90	84,90
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	3,18	3,5	4	3,1	3,15	3,20	3,20
		Rasio PAD	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	0,33	0,33

3.	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	64,00	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10	77,10
4.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	3,8	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54

Sumber : P-RPJMD Kota Malang 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama Tujuan

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian tujuan pembangunan meliputi: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Pertumbuhan Ekonomi, (3) Gini Ratio, (4) Angka Kemiskinan, (5) Indeks Modal Sosial, dan (6) Indeks Reformasi Birokrasi.

06 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENCAPAIAN TUJUAN



C. Parameter Keberhasilan/Kegagalan

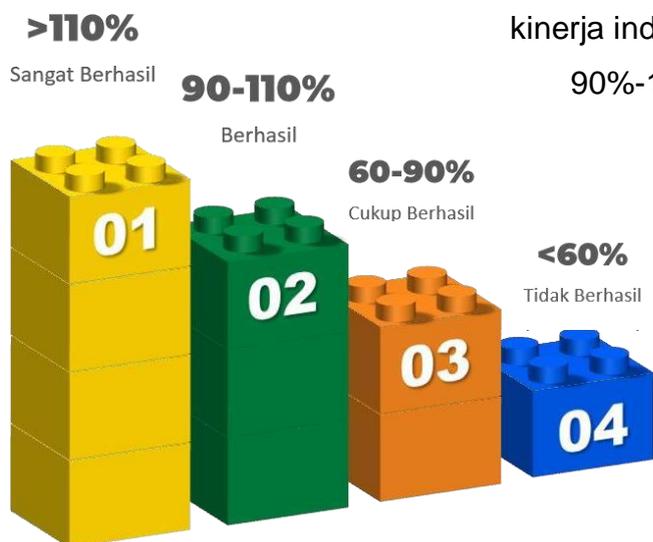
Terdapat tiga aspek keberhasilan/kegagalan kinerja yang digunakan sebagai cara pengukuran, yakni Capaian Kinerja, Anggaran dan Sumber Daya yang mana parameter penentuan tingkat keberhasilan/kegagalannya dapat disimak dalam infografik berikut ini.

Grafik pertama menunjukkan level penilaian Capaian Kinerja.

Kinerja dianggap berhasil apabila rerata capaian kinerja indikator yang telah ditetapkan berkisar 90%-110%. Skor lebih dari 110% diartikan

sangat berhasil sedangkan skor kurang dari 60% diartikan tidak berhasil.

Adapun Parameter Capaian Kinerja dapat dilihat pada gambar di samping.



Gambar 1. Grafik Parameter Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2022, terhadap capaian tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya 101,52% dari target. Keberhasilan tersebut merupakan buah upaya Kota Malang untuk bangkit dari bencana non-alam berupa pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Adaptasi terhadap kondisi *new normal* membuat Pemerintah Kota Malang lebih berinovasi dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Walaupun demikian, masih terdapat indikator yang tidak berhasil mencapai di antaranya adalah Indeks Kematangan SPBE. Selain itu, indikator yang masih kurang maksimal pencapaiannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dan Persentase Penurunan PMKS. Sedangkan indikator lain, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks pembangunan Gender (IPG), dan Nilai SAKIP walaupun kurang maksimal, namun capaiannya sudah di atas 90%.

Belum maksimalnya penurunan PMKS dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang juga tidak lepas dari dampak COVID-19 yang berkelanjutan mulai tahun 2020, dan masih dalam tahap pemulihan. Akan tetapi perlu analisa mendalam terkait angka pengangguran karena terjadi perubahan pola perdagangan yang dulu terbiasa *offline* dan memiliki kantor sekarang menjadi lebih banyak *online* meskipun hanya bekerja di rumah. Perhitungan para pekerja di rumah ini apakah menjadi kategori pengangguran atau tidak masih perlu analisa mendalam. Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, Pemerintah Kota Malang telah melakukan revaluasi prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan ekonomi maupun target kinerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD Tahun 2018-2023.



a) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Visi	Kota Malang Bermartabat				
MISI 1	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar lainnya Bagi Semua Warga				
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,10	79,41	103,00%
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,10	82,69	100,72%
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power parity</i>	85,10	86,16	101,25%
MISI 2	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan, dan keterpaduan				
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%	10,01%*	158,89%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,35	4,36	100,23%
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,60	56,31	83,30%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 3	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berdasarkan keberagaman dan keperpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender				
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50	7,66	97,87%
		Persentase penurunan PMKS	5%	3,76%*	75,20%
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	0,884	0,8483	95,96%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,10	95,24*	98,08%
MISI 4	Memastikan Kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel				
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan	82%	100%	121,95%
	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	83,5	80,7	96,65%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	3,150	3,634*	115,37%
		Rasio PAD	0,30	0,34	113,33%
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	75,84	76,32	100,63%
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	2,6	58,43%	

Capaian kinerja sasaran strategis sebagian besar sudah mencapai target dan ada yang melebihi target. Akan tetapi masih ada kinerja yang belum dapat berhasil mencapai target yaitu pada sasaran meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan indikator IKLHD, sasaran meningkatnya kualitas perlindungan sosial dengan indikator persentase penurunan PMKS belum dapat tercapai secara maksimal karena perlu *update* komponen Fakir Miskin yang mengacu pada data kesejahteraan sosial, sedangkan untuk sasaran

meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi dengan indikator Indeks Kematangan SPBE masih jauh dari target karena domain tata kelola dan manajemen SPBE masih dibawah angka 2 (dua).

b) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 dan *baseline* tahun 2018 diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja yang ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

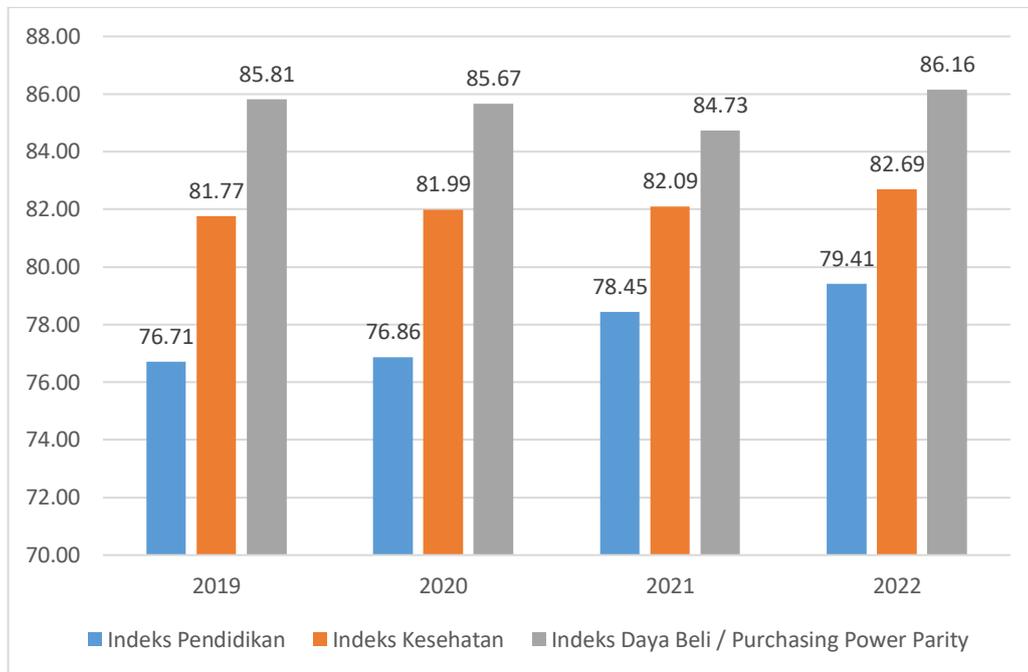
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2018	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,77	77	77,1	78,45	79,41	101,88%	103%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	81,8	82,1	82,09	82,69	100,35%	100,72%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	85	85,1	84,73	86,16	99,68%	101,25%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6,20%	6,30%	4,96%	10,01%	80,00%	158,89%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75	4,20	4,35	4,23	4,36	100,71%	100,23%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,15	67,57	67,60	60,46	56,31	89,48%	83,30%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	-2,23%	5,00%	5,00%	-0,42%	3,76%	0,00%	75,20%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	8,20%	7,50%	9,65%	7,66%	82,32%	97,87%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,868	0,884	0,8415	0,8483	96,95%	95,96%
	Indeks pembangunan Gender	95,25	97,00	97,10	95,24	95,24	98,18%	98,08%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2018	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	(IPG)							
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	60%	82%	100%	100%	166,67%	121,95%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	6,8	82,05	83,5	80,1	80,7	97,56%	96,65%
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	100,00%
	Maturitas SPIP	3,18	3,10	3,150	3,634	3,634	117,23%	115,37%
	Rasio PAD	0,22	0,28	0,30	0,28	0,34	100%	113,33%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	64	74,38	75,84	74,68	76,32	100,40%	100,63%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	4,21	4,45	2,73	2,6	64,84%	58,43%

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kinerja Kota Malang mengalami kenaikan terutama kenaikan terbesar adalah pada persentase pertumbuhan ekonomi kreatif dimana tahun 2022 menjadi 10,01% dari 4,96%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Malang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif dan inovasi Kota Malang dalam membangun **Malang Creative Center (MCC)** sebagai wadah aktivitas/fasilitasi pelaku ekonomi kreatif turut berhasil dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu inovasi Kota Malang untuk mengangkat dan menambah nilai suatu kawasan yang kumuh tapi bersejarah melalui kolaboratif/*cross cutting* infrastruktur, pariwisata dan usaha mikro dapat mewujudkan sebuah kawasan baru yaitu **Kayutangan Heritage** dimana sebuah kawasan kumuh menjadi kawasan dengan nilai tambah untuk perekonomian baru dan tetap melestarikan budaya asli Malang. Kedua inovasi ini dapat mengangkat para pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Meskipun demikian untuk kinerja yang mengalami penurunan masih diperlukan upaya-upaya perbaikan.

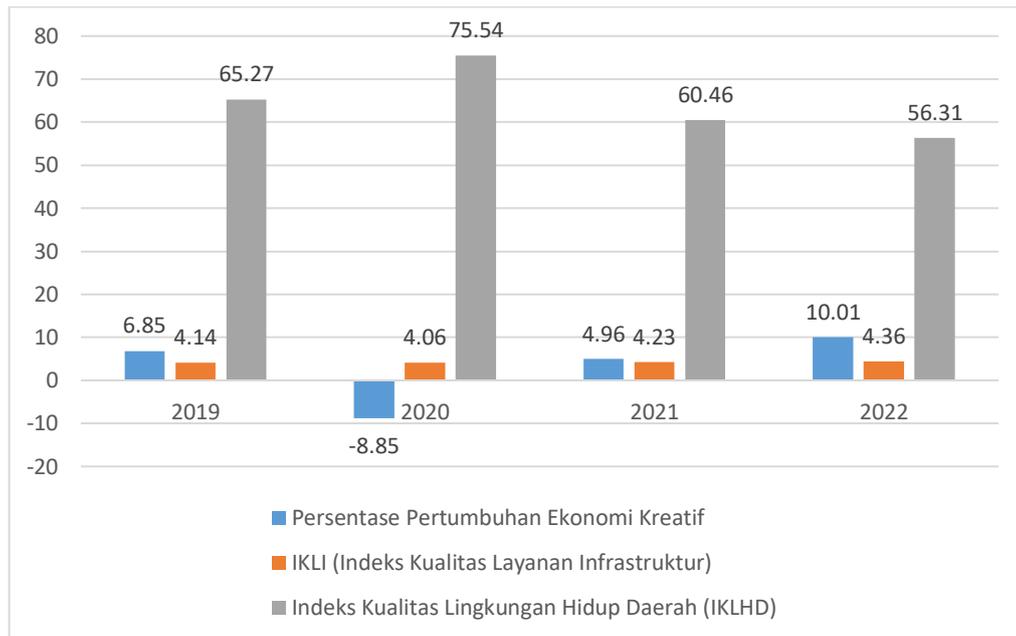
Selain itu sebagai informasi dalam perbaikan perencanaan berikutnya perlu gambaran progres kinerja selama periode RPJMD maka dibandingkan realisasi kinerja mulai tahun 2019 s.d. 2022 sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2022



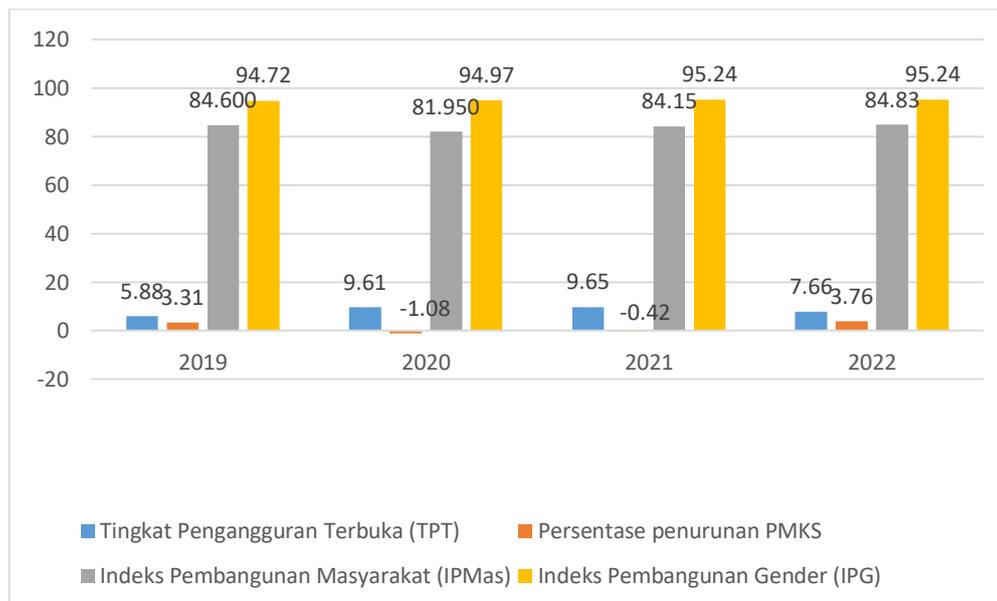
Dari gambar diatas, indikator sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter yaitu indeks pendidikan, indikator sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan yaitu indeks kesehatan, dan indikator sasaran meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan yaitu indeks daya beli meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kota Malang dalam rangka terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya telah berhasil.

Gambar 3. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2022



Dari gambar diatas, indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu pertumbuhan ekonomi kreatif naik sangat signifikan, sedangkan indikator sasaran meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup yaitu IKLHD mengalami penurunan.

Gambar 4. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2022



Dari gambar diatas, kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat signifikan yang tahun 2021 sebesar 9,65 menjadi 7,66. Hal ini tidak lepas atau beririsan dengan inovasi Kota Malang dalam meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif karena daya saing Kota Malang adalah pada para pelaku ekonomi kreatif yang tumbuh dan aktif serta meningkat aktivitasnya yang didukung oleh program kerja pemerintah Kota Malang dan menjadikan wirausaha baru sebagai target kinerja.

Tabel 5.

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	26,37	54	100	100
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	75	80,05	80,10	80,70
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Maturitas SPIP	3,045	3,045	3,634	3,634
	Rasio PAD	0,3	0,25	0,28	0,34
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	66,61	67,06	74,68	76,32
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,85	3,7	2,73	2,6

Sebagai bentuk informasi capaian indikator kinerja makro yang dituangkan dalam indikator tujuan daerah dan progres pencapaian kinerja 5 (lima) tahun periode RPJMD untuk menunjukkan *ultimate outcome/outcome finish* dari Kepala Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 6.

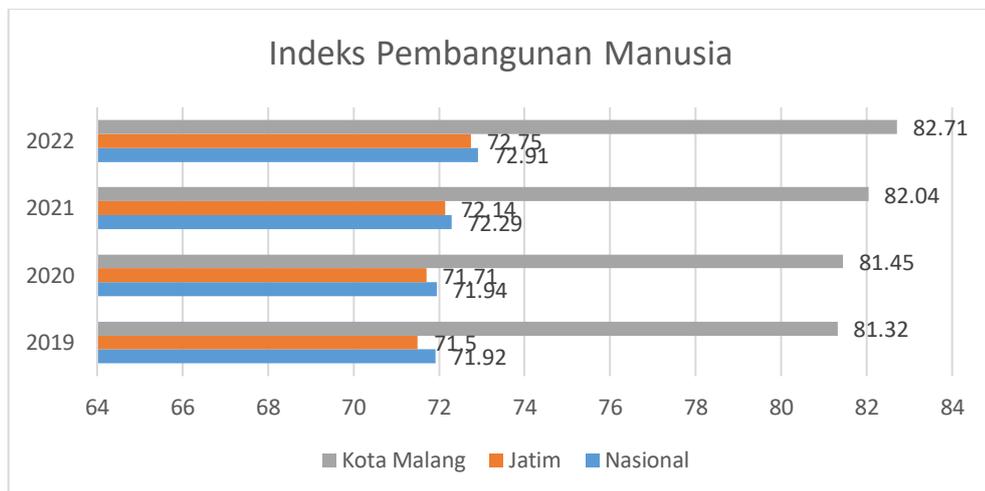
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan terhadap Target Tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi s.d. 2022	Capaian s.d. 2022
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,248	82,71	101%
Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,80%	6,32%	109%
	Gini Rasio	0,39	0,421	108%

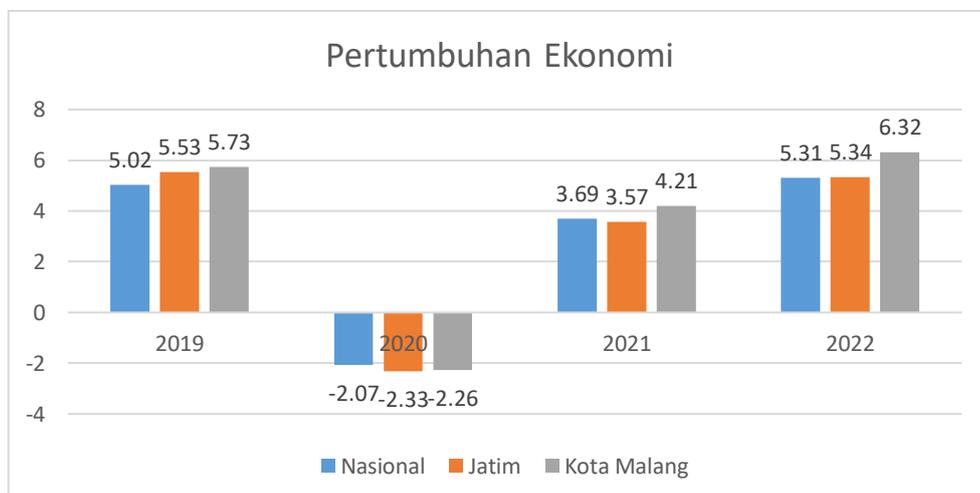
Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi s.d. 2022	Capaian s.d. 2022
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Angka Kemiskinan	3,77%	4,37%	84,08%
	Indeks Modal Sosial	90	83,57	93%
Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	73,51	72,07	98%

Sebagai profil kinerja Pemerintah Kota Malang maka perlu dibandingkan/*benchmark* kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini:

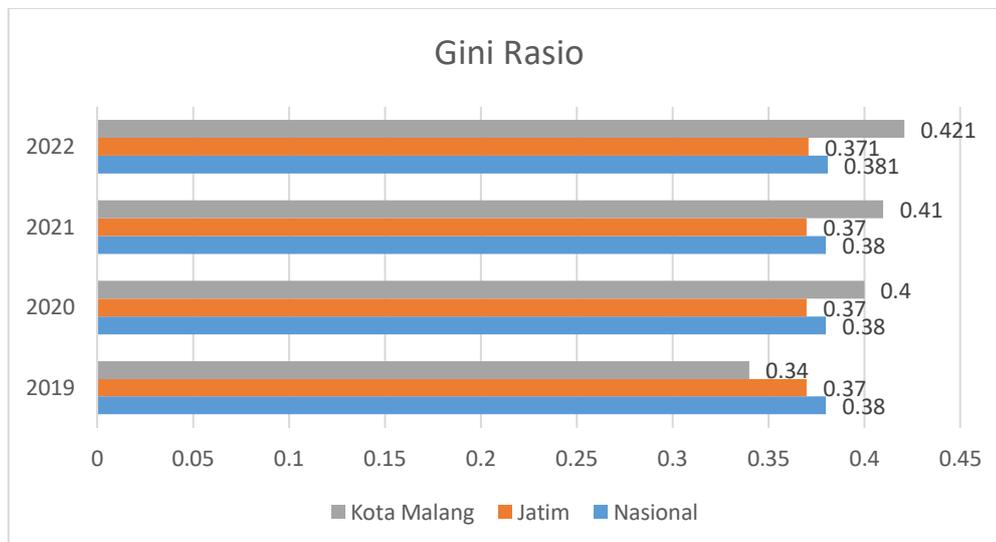
Gambar 5. Benchmark kinerja IPM Tahun 2019-2022



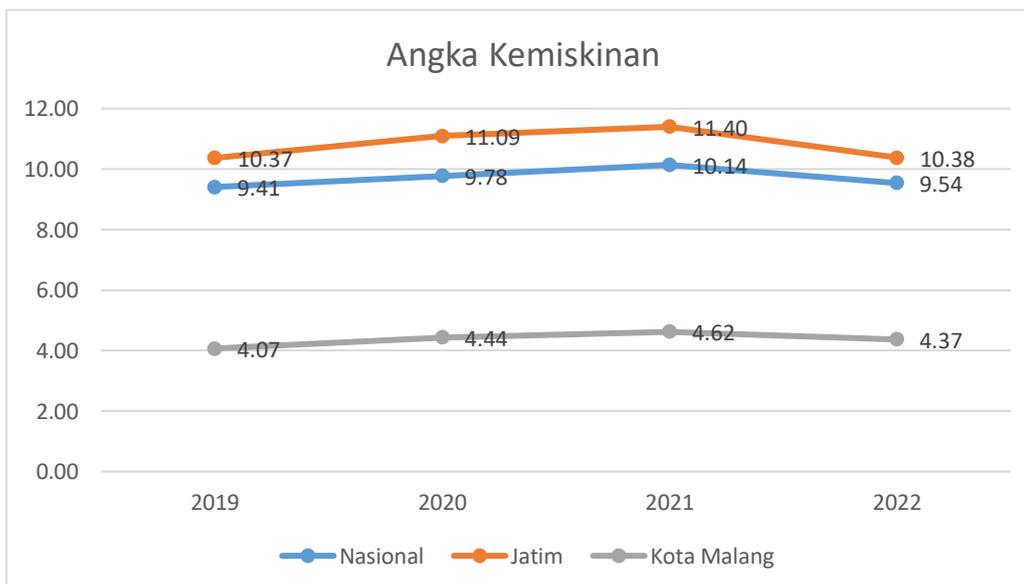
Gambar 6. Benchmark kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2022



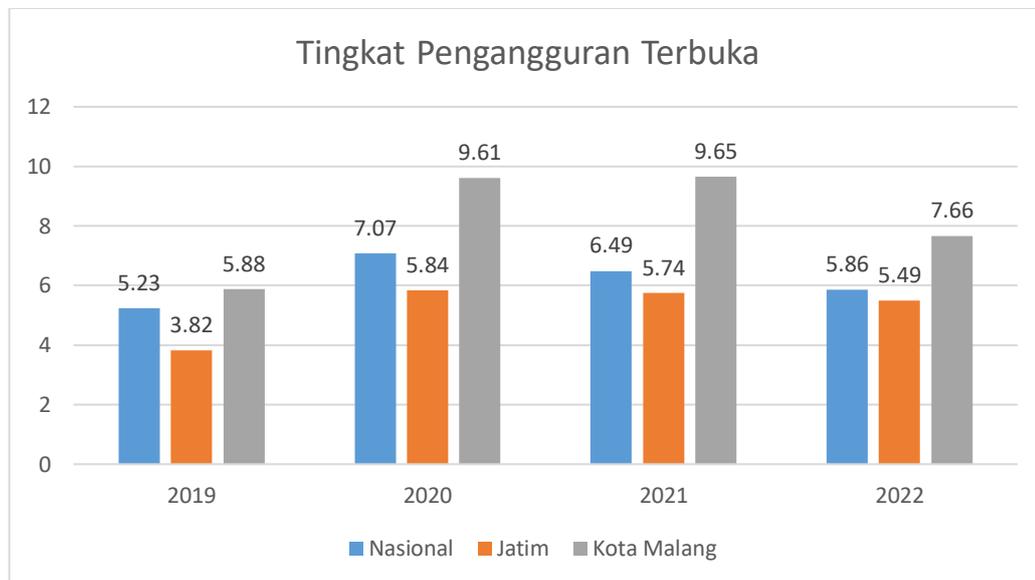
**Gambar 7. Benchmark kinerja Gini Rasio
Tahun 2019-2022**



**Gambar 8. Benchmark kinerja Angka Kemiskinan
Tahun 2019-2022**



Gambar 9. Benchmark kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2022



Sebagian besar kinerja Pemerintah Kota Malang jika dibandingkan/*benchmark* kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional masih di atas rata-rata kecuali Gini rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kedua indikator makro ini menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh Kota Malang meskipun banyak variabel yang tidak bisa diintervensi secara langsung oleh Kota Malang termasuk dalam perhitungannya, dimana Kota Malang adalah kota strategis yang menjadi tempat perdagangan, pendidikan dan perputaran perekonomian sehingga mendapatkan bonus demografi dari daerah di sekitarnya dan menjadi objek dalam perhitungan kedua indikator dimaksud.

c) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan target RPJMD tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan
Target RPJMD Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,2	79,41	102,86%
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,3	82,69	100,47%
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,2	86,16	101,13%
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	10,01%	155,19%
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,5	4,36	96,89%
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63	56,31	83,26%
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,24%	7,66%	77,24%
		Persentase Penurunan PMKS	5,00%	3,76%	75%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,9	0,8483	94,26%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,2	95,24	97,98%
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	100,00%
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	84,9	80,7	95,05%
		Opini BPK;	WTP	WTP	100,00%
		Maturitas SPIP	3,2	3,634	113,56%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Rasio PAD.	0,33	0,34	103,03%
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,1	76,32	98,99%
12	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	2,6	57,27%

d) **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi* (angka un audit)	Capaian (%)	
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1	79,41	103,00%	231.260.235.515,00	224.837.372.621,06	97,22%	105,94%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1	82,69	100,72%	325.008.626.462,00	297.107.169.185,27	91,42%	110,18%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1	86,16	101,25%	12.119.745.515,00	11.777.816.733,00	97,18%	104,18%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,3	10,01	158,89%	66.360.153.851,00	58.469.190.594,00	88,11%	180,33%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35	4,36	100,23%	426.210.679.380,00	328.805.869.773,00	77,15%	129,92%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6	56,31	83,30%	43.133.911.226,00	35.777.121.868,00	82,94%	100,43%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,5	7,66	97,87%	33.510.420.252,00	24.508.993.764,00	73,14%	118,31%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi* (angka un audit)	Capaian (%)	
	Persentase Penurunan PMKS	5	3,76	75,20%				
	Rata-rata Capaian			86,53%				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,884	0,8483	95,96%	104.500.673.153,00	101.026.746.726,00	96,68%	100,36%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,1	95,24	98,08%				
	Rata-rata Capaian			97,02%				
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	82	100	121,95%	13.226.434.895,00	9.800.864.733,00	74,10%	164,58%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	83,5	80,7	96,65%	1.266.511.111.240,00	1.074.419.160.097,00	84,83%	125,35%
	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%				
	Maturitas SPIP	3,15	3,634	115,37%				
	Rasio PAD	0,3	0,34	113,33%				
Rata-rata Capaian			106%					
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	76,32	100,63%	7.287.582.561,00	5.482.323.264,00	75,23%	133,77%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	2,6	58,43%	16.555.649.967,00	16.306.116.512,00	98,49%	59,32%
Rata-rata Capaian				101,52%	2.545.685.224.017,00	2.188.318.745.870,33	85,96%	118,10%

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar **101,52%** dengan realisasi anggaran sebesar **85,96%**. Capaian kinerja tahun ini meningkat dibanding tahun lalu sebesar **94%**. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah.

e) **Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.**

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, dengan indikator Indeks Pendidikan, di mana tercapai sebesar 79,41 dari target tahun 2022 yaitu 77,1 atau sebesar 103%. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu program pengelolaan pendidikan dengan melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan Angka Partisipasi Murni SD/MI. Variabel pembentuk indeks pendidikan yaitu angka Harapan Lama Sekolah 15,76 dan Rata-rata Lama Sekolah 10,69 juga mengalami kenaikan sehingga indeks pendidikan juga meningkat dan mencapai target;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator Indeks Kesehatan, di mana tercapai sebesar 82,69 dari target tahun 2022 yaitu 82,1 atau sebesar 100,72%. Program-program yang mendukung capaian ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terutama dukungan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang merupakan upaya pemuhan SPM urusan Kesehatan serta peningkatan cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan (UHC). Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target. Sedangkan NDR (*Net*

Death Rate) juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mendukung peningkatan kinerja daerah. Selain itu berkat kolaborasi dan komitmen Kota Malang untuk bersama-sama menangani *stunting*, capaian kinerja *stunting* dapat melebihi target. Meskipun demikian *stunting* masih menjadi prioritas karena masih di angka 9,3%. Angka harapan hidup juga meningkat sebesar 73,75 sehingga indeks kesehatan meningkat. Akan tetapi dengan meningkatnya harapan hidup maka perlu diperhatikan penanganan lanjut usia dan rasio ketergantungan lansia;

3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan, dengan indikator Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity*, di mana tercapai sebesar 86,16 dari target tahun 2022 sebesar 85,1, atau sebesar 101,25%. Hal ini karena dukungan beberapa program di antaranya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, dengan indikator Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, di mana tercapai sebesar 10,01% dari target tahun 2022 sebesar 6,30%, atau sebesar 158,89%. Pertumbuhan ekonomi kreatif di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 4,96%. Upaya fasilitasi ekosistem ekonomi kreatif dan para pelaku kreatif baik dalam bentuk bangunan **Malang Creative Center (MCC)** sebagai wadah tempat beraktivitas dan melakukan promosi serta perdagangan dan dukung lainnya dalam bentuk peningkatan expo/pameran produk local kota Malang, pembuatan aplikasi Malpro sebagai wadah para UMKM lokal untuk berjualan dan kewajiban para pegawai menggunakan produk lokal dan berbelanja produk lokal. Aktiviasi kawasan baru yaitu **Kayutangan Heritage** yang menambah nilai ekonomi kawasan tersebut dan peningkatan UMKM ekonomi kreatif maupun investor baru, cukup menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Meskipun demikian masih diperlukan upaya-upaya perbaikan menuju kemandirian sosial dan fiskal;

5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), di mana tercapai sebesar 4,36 dari target tahun 2022 sebesar 4,35 atau sebesar 100,230%. Hal ini disebabkan dukungan beberapa program di antaranya Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Hampir semua indikator dapat tercapai dengan baik, namun perlu upaya perbaikan sendiri untuk mencapai target program yang belum mencapai target terutama pada rumah tidak layak huni. Pencapaian target kepuasan infrastruktur karena Kota Malang tahun 2022 fokus penganggaran adalah pada penanganan perbaikan/pemeliharaan jalan-jalan yang berlubang yang menjadi ketidaknyamanan pengguna jalan;
6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Untuk indikator Indeks Pembangunan Masyarakat telah tercapai sebesar 0,8483 dari target tahun 2022 sebesar 0,884, atau sebesar 95,96%. Sedangkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah tercapai sebesar 95,24 dari target tahun 2022 sebesar 97,10 atau sebesar 98,08%. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut adalah 97,02%. Hal ini disebabkan dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (di 57 Kelurahan). Faktor pembentuk yang mempengaruhi IPMas adalah Indeks Gotong Royong; Indeks Toleransi; dan Indeks Rasa Aman dimana saat ini komponen terbesar hasil survei terhadap masyarakat adalah Indeks Toleransi sebesar 0,90 yang menggambarkan stabilitas kehidupan masyarakat di lingkungannya saling menghormati, toleransi. Selain itu masyarakat juga aktif berpartisipasi dalam melakukan kegiatan bersama dan peduli terhadap lingkungan ditunjukkan dengan indeks gotong royong dengan nilai sebesar 0,83;
7. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum dengan indikator Persentase perda yang ditegakkan, di mana tercapai sebesar 100%

dari target tahun 2022 sebesar 82% atau sebesar 121,95%. Hal ini tercapai dengan dukungan program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Target capaian program semua tercapai 100% dengan dukungan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Fasilitasi Bantuan Hukum;

8. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif dengan indikator Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP dan Rasio PAD. Target rata-rata tercapai 106% melalui dukungan beberapa program diantaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh semua Perangkat Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan kecamatan, Program Penyelenggaraan Pengawasan serta pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan inspektorat, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dengan seluruh *stakeholder Hexahelix* yang dilakukan Bappeda dalam rangka kolaborasi/*cross cutting* menyelesaikan isu strategis daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka menjaga keselarasan dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran. Selain itu rasio PAD meningkat di tahun 2022 yaitu sebesar 0,34 dari tahun 2021 sebesar 0,28. Hal ini adalah upaya Kota Malang menuju kemandirian fiskal yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) melalui optimalisasi retribusi parkir menggunakan *e-parking*, peningkatan kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD dengan mengubah pengelolaan aset dari sistem izin pemakaian (IP) menjadi sewa dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
9. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN, di mana tercapai sebesar 76,32 dari target tahun 2022 sebesar 75,84 atau sebesar 100,63%. Target dapat tercapai melalui dukungan Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (terkait standar kompetensi yang ditetapkan).

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang **Belum Berhasil** mencapai target adalah pada sasaran:

1. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, di mana tercapai sebesar 56,31 dari target tahun 2022 sebesar 67,60 atau sebesar 83,3% menurun dari tahun sebelumnya. Ketidakberhasilan mencapai target di tahun ini disebabkan rendahnya indeks kualitas air yang hanya sebesar 29,26. Hal ini disebabkan Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kondisi hulu sungai yang dengan kondisi terjadi hujan lebat dimana membawa banyak material pencemar yang terlarut di dalam arus sungai sehingga menyebabkan kualitas air sungai yg masuk ke wilayah Kota Malang menjadi keruh dan tercemar. Selain itu masih tingginya pencemaran sungai dari limbah pertanian dan peternakan yang belum memenuhi standar baku mutu;
2. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial, dengan indikator persentase penurunan PMKS dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk indikator Persentase Penurunan PMKS telah tercapai sebesar 3,76% dari target tahun 2022 sebesar 5,00% atau sebesar 75,20%. Meskipun belum tercapai optimal akan tetapi meningkat dibanding tahun sebelumnya pada angka -0,42%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan upaya menangani PMKS. Sedangkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka telah tercapai sebesar 7,66 dari target tahun 2022 sebesar 7,50 atau sebesar 97,87% dan mengalami penurunan signifikan dari tahun 2021 yang sebesar 9,65%. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut adalah 86,53%. Meskipun penurunan PMKS mengalami progres akan tetapi belum dapat menurunkan jumlah PMKS secara signifikan. Pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk fakir miskin yang terdata di DTKS dan belum menerima bantuan apa pun dan keberlanjutan bantuan non tunai melalui e-warung menjadi upaya peningkatan kinerja;
3. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi, dengan target indikator Indeks Kematangan SPBE di mana tercapai sebesar 2,6 dari target tahun 2022 sebesar 4,45 atau sebesar 58,43% dan menurun dibanding tahun

sebelumnya yaitu dengan nilai 2.73. Hal ini disebabkan belum optimalnya penguatan peraturan perundang-undangan daerah terkait perencanaan SPBE dan penataan arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Domain tata kelola dan manajemen SPBE pada Indeks Kematangan SPBE masih dibawah angka 2 (dua), padahal domain layanan SPBE sudah di angka 3,57. Ini menunjukkan sebenarnya untuk e-government sudah cukup bagus akan tetapi perlu penguatan pada domain tata kelola yang nilainya hanya 1,09 dan domain manajemen dengan nilai 1,90. Sedangkan domain kebijakan masih bisa dioptimalkan karena nilai masih 2,50. Manajemen pengetahuan SPBE, kegiatan manajemen perubahan SPBE, manajemen layanan SPBE dianggap diterapkan tanpa perencanaan. Selain itu hasil evaluasi indikator SPBE menunjukkan bahwa Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum tersedia, Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi, Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum diterapkan atau diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana, Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan, Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Telaah evaluasi Indeks SPBE menjadi prioritas untuk diselesaikan karena pemerintahan berbasis elektronik harus diterapkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Adapun **Upaya Perbaikan** dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah:

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengelolaan air limbah domestik, industri, rumah sakit, hotel dan perdagangan jasa sehingga kualitas air sungai menjadi lebih baik. Selain itu kondisi pemantauan kualitas air sungai seharusnya dapat menjadi dasar untuk ditingkatkan pengelolaan sungainya agar memenuhi standar baku mutu sehingga perlu dilakukan pemantauan rutin kualitas Air Sungai dan Udara Ambien secara berkala minimal 3 bulan sekali pada tiap tahunnya. Perlu menjadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai prioritas agar Indeks Kualitas Lahan mengalami peningkatan. Melakukan upaya pencegahan pembuangan sampah ke sungai dengan melibatkan peran serta masyarakat seperti pelaksanaan Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) secara

- rutin dan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di emukiman yang ada di bantaran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai;
2. Upaya mengurangi PMKS melalui optimalisasi peran serta puskesmas dan memaksimalkan *update* data kesejahteraan sosial *by name, by address* dan *by needs* sehingga penanganan PMKS dapat optimal sesuai kebutuhan dan dapat mengentaskan PMKS mandiri. Selain itu sebagai bentuk kolaborasi antar Perangkat Daerah agar terjadi kesinambungan program dan kegiatan pemerintah dengan pengentasan kemiskinan, maka *update* data kesejahteraan sosial yang akan dijadikan DTKS menjadi data/objek/kelompok sasaran setiap kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Isu strategis kemiskinan dijadikan prioritas untuk diselesaikan secara bersama *cross cutting* pada perencanaan berikutnya. Setiap Perangkat Daerah mengetahui peran dan irisan/kolaborasi yang dilakukan untuk turut menangani kemiskinan. Sehingga diharapkan penanganan kemiskinan menjadi terpadu efektif dan efisien;
 3. Upaya meningkatkan kematangan SPBE melalui penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE yang sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional, selain itu memastikan penerapan SPBE dilakukan berdasarkan perencanaan SPBE yang telah disusun. Manajemen Risiko SPBE perlu disusun dan diterapkan agar program kegiatan yang terarah dan terencana.
 4. Dalam rangka perbaikan kinerja, maka diperlukan perencanaan yang efektif menyelesaikan *gap* kinerja dan permasalahan aktual. Oleh karena itu pada penyusunan perencanaan tahun 2024 diupayakan perbaikan dengan melaksanakan forum lintas Perangkat Daerah bersama *stakeholder hexahelix* dengan *cross cutting* pada isu strategis yang terdapat di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan **tematik *cross cutting*** arah kebijakan tahun pertama dan permasalahan aktual yaitu: Stunting, Kemiskinan, Birokrasi yang responsive dan adaptif, Daya Saing SDM, Perlindungan sosial dan daya beli, Tata Kota dan *Branding*.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum rata-rata capaian kinerja sasaran dalam kategori Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga dan Masyarakat. Terutama dalam peran serta semua stakeholder hexahelix untuk bangkit dan pulih dari dampak pandemik Covid-19 mulai tahun 2020. Semua upaya kolaborasi ini berhasil meningkatkan kinerja sangat signifikan yaitu dengan menurunnya angka kemiskinan dari 4,62 menjadi 4,37 dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,65 menjadi 7,66. Semua kinerja ini juga berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2022 yang meningkat sangat signifikan dari 4,21 menjadi 6,32. Semua kinerja ini menunjukkan dampak pada semua sektor baik perekonomian maupun kesejahteraan sosial.

Capaian kinerja makro/ultimate outcome yang meningkat signifikan selarsa dengan capaian kinerja sasaran Kota Malang sebesar 101,52% yang meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 94%. Berbagai inovasi telah dilakukan dalam mencapai percepatan kinerja yaitu melalui peningkatan adaptasi digital baik di sektor pendidikan, perdagangan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan perizinan, kesehatan, dan sebagainya.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diketahui langkah-langkah strategis dan upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam mencapai target kinerja di tahun mendatang.



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malang, 20 Oktober 2022
WALIKOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,10
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,10
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,10
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,3%
5.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35
6.	Meningkatnya Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,60
7.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%
		2. Persentase penurunan PMKS	5%
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,884
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,10
9.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	82%
10.	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	1. Nilai Sakip	83,5
		2. Opini BPK	WTP
		3. Maturitas SPIP	3,15
		4. Rasio PAD	0,30
11.	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	75,84
12.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45

No.	PROGRAM	PAGU
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.151.646.412.216,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	224.401.310.601,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	32.480.000,00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	371.200.000,00

No.	PROGRAM	PAGU
5	Program Pengembangan Kebudayaan	1.298.440.000,00
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	138.500.000,00
7	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	281.120.000,00
8	Program Pengelolaan Permuseuman	1.598.899.150,00
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	200.190.606.614,00
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.984.285.472,00
11	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	445.028.000,00
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.685.821.800,00
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.652.179.898,00
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.180.567.400,00
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.503.758.182,00
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	62.757.741.297,00
17	Program Pengembangan Permukiman	16.815.417.376,00
18	Program Penataan Bangunan Gedung	88.460.109.319,00
19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	9.135.090.000,00
20	Program Penyelenggaraan Jalan	176.311.550.450,00
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	858.380.000,00
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.087.962.672,00
23	Program Pengembangan Perumahan	3.788.869.810,00
24	Program Kawasan Permukiman	150.405.000,00
25	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	411.660.924,00
26	Program Pengelolaan Tanah Kosong	91.720.000,00
27	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.212.013.319,00
28	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.133.314.636,00
29	Program Penanggulangan Bencana	2.475.531.750,00
30	Program Pemberdayaan Sosial	2.636.904.500,00
31	Program Rehabilitasi Sosial	14.180.627.100,00
32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	15.811.574.500,00
33	Program Penanganan Bencana	247.737.302,00
34	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	342.546.850,00
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	463.895.360,00
36	Program Perlindungan Perempuan	134.992.000,00
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	470.307.300,00
38	Program Perlindungan Khusus Anak	549.558.400,00
39	Program Pengendalian Penduduk	301.175.112,00
40	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.970.581.000,00
41	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.281.854.888,00
42	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.785.390.734,00

No.	PROGRAM	PAGU
43	Program Penempatan Tenaga Kerja	78.180.000,00
44	Program Hubungan Industrial	212.850.000,00
45	Program Promosi Penanaman Modal	106.620.000,00
46	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.217.901.670,00
47	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	387.935.000,00
48	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	182.140.000,00
49	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.681.509.400,00
50	Program Pengawasan Keamanan Pangan	82.975.000,00
51	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.139.280.000,00
52	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	509.270.000,00
53	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.244.046.945,00
54	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	620.054.070,00
55	Program Penyuluhan Pertanian	407.412.000,00
56	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	171.708.000,00
57	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	575.900.000,00
58	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	15.848.672.500,00
59	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	11.950.000,00
60	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	400.800.900,00
61	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	148.217.000,00
62	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	130.930.000,00
63	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.755.000,00
64	Program Pengelolaan Persampahan	22.616.295.154,00
65	Program Pendaftaran Penduduk	1.247.438.000,00
66	Program Pencatatan Sipil	1.685.582.000,00
67	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	306.178.500,00
68	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	59.490.000,00
69	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	50.937.587.598,00
70	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	3.380.226.332,00
71	Program Aplikasi Informatika	10.825.476.023,00
72	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.110.613.499,00
73	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	303.590.613,00
74	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	132.523.000,00
75	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	298.605.000,00
76	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	555.597.800,00
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	228.828.008,00

No.	PROGRAM	PAGU
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.469.162.886,00
79	Program Pengembangan UMKM	266.301.200,00
80	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	78.066.400,00
81	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.199.319.028,00
82	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2.747.610.000,00
83	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	376.362.900,00
84	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.233.158.800,00
85	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	38.885.795.325,00
86	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	13.460.000,00
87	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	97.980.000,00
88	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.386.265.805,00
89	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27.811.140.242,00
90	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000,00
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.195.605.000,00
92	Program Pemasaran Pariwisata	376.213.290,00
93	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	145.000.000,00
94	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.603.752.580,00
95	Program Pembinaan Perpustakaan	1.252.019.959,00
96	Program Pengelolaan Arsip	506.113.581,00
97	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	17.504.533.000,00
98	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.576.811.000,00
99	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	33.106.944.198,00
100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.147.911.500,00
101	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.680.616.320,00
102	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.283.255.000,00
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	43.435.792.400,00
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.456.857.460,00
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.831.454.700,00
106	Program Kepegawaian Daerah	4.810.689.561,00
107	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.060.620.000,00
108	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.426.340.080,00
109	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.401.859.610,00
110	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.800.259.883,00
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	113.754.577.965,00
112	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.250.973.000,00
113	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	130.652.400,00

No.	PROGRAM	PAGU
114	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	515.175.000,00
115	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	7.521.867.000,00
116	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	244.015.000,00
117	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	435.530.000,00
118	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.991.502.000,00

Malang, 20 Oktober 2022

